

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KETERGANTUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI AUDIT TERHADAP  
AUDIT DELAY**

*(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat)*

**Artikel**

*Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Pada Program Studi Akuntansi di Universitas Negeri Padang*



**Oleh :**

**IGA ELFIANA SYAHYUNI**

**2012/1202593**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN ARTIKEL

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KETERGANTUNGAN  
PEMERITAH DAERAH DAN OPINI AUDIT TERHADAP *AUDIT DELAY*

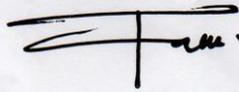
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat)

Nama : Iga Elfiana Syahyuni  
NIM/TM : 1202593/2012  
Jurusan : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



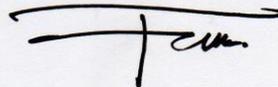
Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak  
NIP: 19730213 199903 1 003

Pembimbing II



Mayar Afriventi, SE, M. Sc, Ak  
NIP: 1984013 200912 2 005

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak  
NIP: 19730213 199903 1 003

# **Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Ketergantungan Pemerintah Daerah dan Opini Audit Terhadap Audit *Delay***

## **Effect Of Local Government Size, Local Government Dependency and Audit Opinion On *Delay* Audit**

Iga Elfiana Syahyuni<sup>1)</sup>, Fefri Indra Arza<sup>2)</sup>, Mayar Afriyenti<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>*Mahasiswa Jurusan Ekonomi, FE, Universitas Negeri Padang*

<sup>2)</sup>*Dosen Jurusan Ekonomi, FE, Universitas Negeri Padang*

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar, Padang, Sumatera Barat, Indonesia, 25131.*

*Telp.(075144375)*

E-mail: [igafiana0660@gmail.com](mailto:igafiana0660@gmail.com)

---

### **ABSTRACT**

*The financial statements are the results of operational activities. The financial statements are made to inform internal and external users in decision making. In order for the financial statements to be directly useful to the user, the information in the financial statements should be presented accurately, openly (transparently) and reported on time. To meet the timeliness of financial statements, managers and auditors are expected to minimize audit delay. Audit delay can be affected by two things: when the audit is started and how long it takes to carry out the audit. When the start of an audit depends on when the local government's financial report is submitted to BPK. So that the length of time the local government submits the financial statements to the auditor can affect the length of audit delay. The study was categorized into causative research (causative). Where this study aims to see how far the independent variables affect the dependent variable. This research tries to explain the influence of local government size (X1), dependence of local government (X2) and audit opinion (X3) as independent variable to audit delay (Y) as dependent variable. The type of data used in this study is secondary data, ie data obtained by researchers indirectly through intermediary media (obtained and recorded by other parties). Research result X1 The size of local government to audit delay have positive and significant effect to audit delay  $-3,301 > -2,000$ . X2 The local government's dependency on audit delay significantly and negatively impacts audit delay  $-3,624 < 2,000$ . X3 Audit opinion on audit delay is not found any influence of opinion to audit delay  $-1,551 > 2,000$ .*

**Keyword: Size of Local Government, Local Government Dependency, Audit Opinion, Audit Delay**

---

## PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan hasil kegiatan operasional. Laporan keuangan dibuat untuk memberi informasi kepada pengguna internal dan eksternal dalam pengambilan keputusan. Agar laporan keuangan tersebut dapat berguna secara langsung bagi penggunanya maka informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara akurat, terbuka (transparan) dan dilaporkan tepat waktu.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan berperan dalam menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) karakteristik kualitatif dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan terdiri dari relevan, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu (*predictive value*) dan dapat menegaskan atau memperbaiki harapan yang dibuat sebelumnya (*feedback value*). Selain itu, agar relevan informasi harus disajikan tepat waktu bagi pengambil keputusan sebelum mereka kehilangan kesempatan atau kemampuan

untuk mempengaruhi keputusan yang diambil (*timeliness*).

Untuk memenuhi ketepatan waktu laporan keuangan, manajer dan auditor diharapkan untuk meminimalkan audit *delay*. Carslaw dan Kaplan (1991) dalam Nabilla Ilna (2015) menjelaskan bahwa audit *delay* dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu kapan audit dimulai dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit tersebut. Kapan dimulainya audit tergantung kapan laporan keuangan pemda diserahkan kepada BPK. Sehingga lamanya waktu pemda menyampaikan laporan keuangan kepada auditor dapat mempengaruhi lamanya audit *delay*.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk memastikan bahwa laporan keuangan mereka disajikan secara tepat waktu karena laporan keuangan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik (Mohamad, 2012 dalam Aris, 2014). Seperti yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintahan daerah seharusnya menyerahkan laporan keuangan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Apabila terjadi keterlambatan penyerahan laporan keuangan, maka akan menyebabkan BPK terlambat untuk memberikan opini audit.

Keterlambatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) bermula dengan adanya kewajiban pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) menyusun laporan

keuangan daerah dengan cara konsolidasi yaitu menggabungkan laporan-laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Apabila salah satu laporan SKPD bermasalah maka akan berdampak secara keseluruhan pada penyusunan laporan yang akan dikonsolidasi, sehingga akan berpengaruh juga pada waktu pelaporan penyampaian laporan keuangan. Perbedaan waktu antara tanggal penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah daerah kepada BPK dengan tanggal penyampaian opini audit oleh BPK disebut sebagai audit delay.

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka jenis penelitian ini dikelompokkan pada penelitian kausatif (*causative*). Dimana penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh ukuran pemerintah daerah (X1), ketergantungan pemerintah daerah (X2) dan opini audit (X3) sebagai variabel independen terhadap audit delay (Y) sebagai variabel dependen.

### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

### 2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria yang dibuat peneliti. Kriteria atas sampel dalam penelitian ini adalah menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah

secara lengkap sesuai dengan variabel yang dibutuhkan pada tahun 2013 sampai dengan 2016.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atas laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan data yang tidak dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

- a. Laporan keuangan pemerintah se-Kabupaten/Kota Sumatera Barat tahun 2013 sampai tahun 2016.
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013 sampai tahun 2016 dari BPK.

Pengumpulan data terbagi 2 yaitu studi kepustakaan adalah dengan mempelajari buku-buku dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian penulis. Dan penelitian lapangan, Data penelitian dikumpulkan dengan mengumpulkan bukti, catatan atas laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan data yang tidak dipublikasikan yang telah dicatat oleh pihak lain.

Variabel penelitian terbagi 2 yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen Menurut Sulistyawati (2009) dan Yuliansari (2011) menjelaskan audit delay adalah rentang waktu lamanya hari dalam menyelesaikan proses audit oleh auditor independen dari tanggal tutup buku pada tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan

auditor independen. Variabel ini diukur secara kuantitatif dalam jumlah hari. Variabel independen Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, dan opini audit.

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai variabel-variabel penelitian, yaitu Audit Delay (AD), Ukuran Pemerintah Daerah (LogAset), Tingkat Ketergantungan Daerah (RasioPTP), dan Opini Audit (Opini). Pada penelitian ini, analisis deskriptif menggunakan output aplikasi SPSS. Menurut Ghozali (2011) model regresi adalah sebuah persamaan yang menggambarkan arah pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Pada model penelitian ini persamaan regresi yang digunakan adalah regresi berganda.

Uji asumsi klasik adalah prasarat yang harus dipenuhi dalam melakukan regresi linear. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov*.

Menurut Ghozali (2011) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF). Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ada korelasi antar anggota sampel. Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian dengan *Run Test*.

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Uji f-statistik pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan nilai F tabel dengan F hitung.

Koefisien determinasi pengujian  $R^2$  digunakan untuk mengukur proporsi atau presentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen.  $R^2$  berkisar antara 0 sampai 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Apabila  $R^2$  sama dengan 0, hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, dan bila  $R^2$  semakin kecil mendekati 0, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel independen semakin kecil terhadap

variable dependen. Apabila  $R^2$  semakin besar mendekati 1, hal ini menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengujian parsial pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menentukan nilai t tabel ditentukan dengan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan  $df = (n-k-1)$  dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel.

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data dan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan berdasarkan pada hasil kriteria yang telah dijelaskan di atas.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dengan melakukan pengujian menggunakan *software* pengolah SPSS versi 16. Proses pengolahan data dimulai dengan *input* variabel-variabel penelitian ke program SPSS dan menghasilkan *output* sesuai dengan metode analisis data yang telah ditentukan. Sampel penelitian ditentukan secara *total sampling*.

Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini adalah pemerintah daerah se-kabupaten/kota Sumatera Barat yang terdiri dari 19 kabupaten/kota. Sampel pada

penelitian ini adalah kabupaten dan kota yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam IHPS Semester I. sedangkan kriteria yang ditentukan adalah tahun yang telah ditentukan yang berjumlah 4 tahun dari tahun 2012 sampai 2016.

Analisis deskriptif bertujuan memberikan informasi mengenai gambaran data meliputi jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi dari variabel- variabel penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, dan opini audit dengan variabel terikatnya adalah audit *delay*.

Uji normalitas adalah tujuan dari uji normalitas residual ini adalah untuk menguji dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian normalitas residual data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *one sample kolmogorov-smirnov test*, yang mana jika nilai  $asympt.sig (2-tailed) > 0,05$  maka distribusi data dikatakan normal.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah sebuah model

regresi linier ada korelasi antara kesalahan penggunaan periode 1 dengan kesalahan t-1 (sebelumnya) jika terjadi berarti ada problem autokorelasi. Model yang baik harus bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya maka dilakukan pengujian metode Durbin-Watson dengan kriteria Gujarati (2006) dalam Dion (2016), nilai Durbin-Watson sebesar 1,365 berada pada rentang 1,10-1,54 berarti data bebas dari gangguan autokorelasi.

Uji multikolinearitas gejala multikolinearitas ditandai dengan adanya hubungan yang kuat diantara variabel independen (bebas) dalam suatu persamaan regresi. Model regresi yang dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,10. Hasil pengujian asumsi multikolinearitas untuk variabel penelitian ini dapat dilihat berdasarkan nilai VIF dan nilai Tolerance.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat hasil pengolahan data SPSS 16 yaitu nilai VIF dan tolerance. Nilai VIF untuk variabel ukuran pemerintah daerah (X1) sebesar 1,080 dengan tolerance sebesar 0,926 untuk ketergantungan pemerintah daerah (X2) nilai VIF sebesar 1,150 dengan tolerance sebesar 0,869 dan untuk opini audit (X3) memiliki nilai VIF sebesar 1,069 dengan tolerance sebesar 0,935. Dimana lebih besar dari 0,1, maka dengan nilai di atas dapat

disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel bebas.

Uji koefisien determinasi Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Apabila nilai  $R^2$  mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas secara keseluruhan berpengaruh besar terhadap variabel terikat. Sebaliknya, semakin mendekati nol, maka variabel bebas secara keseluruhan tidak ada hubungannya dengan variabel terikat. Didapat nilai Adjusted R Square sebesar 0,151. Hal ini mengidentifikasi bahwa kontribusi variabel ukuran pemerintah daerah, ketergantungan pemerintah daerah dan opini audit terhadap audit *delay* sebesar 15,1%. Berarti 15,1% faktor yang berpengaruh terhadap audit *delay* dapat dijelaskan oleh ukuran pemerintah daerah, ketergantungan pemerintah daerah dan opini audit. Sedangkan lebihnya 84,9% lagi dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat pada penelitian lain.

Uji F-test dilakukan untuk menguji apakah secara bersama-sama variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah fix atau tidak. Patokan yang digunakan dengan membandingkan nilai sig. yang didapat dengan derajat signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Apabila nilai

sig. lebih kecil dari derajat signifikansi maka persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan (sudah fix).

Hasil pengolahan data pada tabel di atas menunjukkan hasil nilai F hitung sebesar 6,566 dan nilai Sig. sebesar 0,000 maka dalam uji F Test menetapkan bahwa jika probabilitas Sig.  $> \alpha$  (0,05) atau F hitung  $<$  F tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X1, X2 dan X3 secara bersama-sama terhadap variabel Y dan sebaliknya jika  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X1, X2 dan X3 terhadap variabel Y.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dari hasil pengujian SPSS di atas dapat dilihat nilai F hitung sebesar 6,566 dan nilai Sig. sebesar  $0,000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, hal ini dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X1, X2 dan X3 secara bersama-sama terhadap variabel Y. Uji statistik t merupakan pengujian yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikatnya.

Dari pengolahan data statistik di atas maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

#### 1) Pengujian $H_1$ Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap audit delay

Dari hasil pengujian output SPSS di atas, diperoleh bahwa variabel ukuran pemerintah daerah memiliki nilai signifikan (sig t) X1 terhadap Y sebesar -3,301 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 2,000 (dk = 72) (dk =  $N-K-1=76-3-1=72$ ) dan nilai Sig. variabel X1 terhadap Y sebesar  $0,001 < 0,05$  dan  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  ( $-3,301 < -2,000$ ) maka hipotesis yang diperoleh yaitu  $H_0$  diterima dan  $H_a$  diterima. Berarti dapat disimpulkan dari hipotesis yang diperoleh bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara variabel X1 terhadap variabel Y.

#### 1) Pengujian $H_1$ Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap audit delay

Dari hasil pengujian output SPSS di atas, diperoleh bahwa variabel ukuran pemerintah daerah memiliki nilai signifikan (sig t) X1 terhadap Y sebesar -3,301 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 2,000 (dk = 72) (dk =  $N-K-1=76-3-1=72$ ) dan nilai Sig. variabel X1 terhadap Y sebesar  $0,001 < 0,05$  dan  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  ( $-3,301 < -2,000$ ) maka hipotesis yang diperoleh yaitu  $H_0$  diterima dan  $H_a$  diterima. Berarti dapat disimpulkan dari hipotesis yang diperoleh bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara variabel X1 terhadap variabel Y.

## 2) Pengujian H2 ketergantungan pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan negative terhadap audit delay

Dari hasil pengujian output SPSS di atas, diperoleh bahwa ketergantungan pemerintah daerah memiliki nilai signifikan (sig t) X1 terhadap Y sebesar -3,624 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 2,000 dan nilai Sig. variabel X2 terhadap Y sebesar  $0,000 < 0,05$  dan  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  ( $-3,624 < -2,000$ ) maka hipotesis yang diperoleh yaitu  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Berarti dapat disimpulkan dari hipotesis yang diperoleh bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara variabel X2 terhadap variabel Y.

## 3) Pengujian H3 opini audit berpengaruh negatif terhadap audit delay

Dari hasil pengujian output SPSS di atas diperoleh bahwa variabel opini audit memiliki nilai signifikan (sig t) X3 terhadap Y sebesar -1,551 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 2,000 dan nilai Sig. variabel X3 terhadap Y sebesar  $0,124 > 0,05$  dan  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  ( $-1,551 > -2,000$ ) ) maka hipotesis yang diperoleh yaitu  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Berarti dapat disimpulkan dari hipotesis yang diperoleh bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X1 terhadap variabel Y.

## B. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, ditemukan bahwa hipotesis pertama diterima

dan dapat disimpulkan bahwa ditemukan adanya pengaruh signifikan negatif ukuran pemerintah daerah terhadap audit delay. Hal ini dapat dilihat dari nilai tabel uji persamaan regresi berganda yaitu -3,301 dimana signifikannya lebih kecil dari nilai  $\alpha$  0,05 dengan nilai koefisien  $\beta$  sebesar 2,000. Artinya bahwa berapa pun besar ukuran pemerintah di suatu kabupaten/kota Sumatera Barat berpengaruh terhadap lamanya waktu penyelesaian audit.

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, hipotesis pada variabel kedua diterima. Hal ini dapat dilihat dari nilai tabel uji persamaan regresi berganda yaitu -3,624 dimana signifikannya lebih kecil dari nilai  $\alpha$  0,05 dengan nilai koefisien  $\beta$  negatif sebesar 2,000. Artinya bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap audit delay.

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, ditemukan bahwa hipotesis ketiga ditolak dan dapat disimpulkan tidak ditemukan adanya pengaruh opini audit terhadap audit delay. Hal ini dapat dilihat dari nilai tabel uji persamaan regresi berganda yaitu -1,551 dimana signifikannya lebih besar dari nilai  $\alpha$  0,05 dengan nilai koefisien  $\beta$  sebesar 2,000. Artinya opini audit tidak berpengaruh terhadap audit delay.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Ukuran pemerintah daerah merupakan suatu indikator dalam menentukan hasil pemeriksaan audit dan ketepatan dalam pemberian opini audit, dan juga menjadi indikator dalam menentukan lamanya pemeriksaan (audit delay). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Payne dan Jansen (2002), dimana hasil yang didapat ukuran kota/kabupaten yang besar akan mengalami audit delay yang lama, dan juga membutuhkan banyak waktu serta bukti yang harus dikumpulkan dari sebuah proses audit yang berjalan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap audit delay sebab hasil output yang di dapat nilai Sig. variabel  $X_1$  terhadap Y sebesar  $0,001 > 0,05$  dan  $t$  hitung  $> t$  tabel ( $-3,301 > -2,000$ ), hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki jumlah kabupaten yang banyak akan mempengaruhi dari lamanya proses audit yang dilakukan (Audit delay).

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap audit

delay. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap audit delay merupakan sebuah indikator dimana pemerintah akan menjadikan audit delay sebagai sesuatu yang dapat memperlambat kinerja pemerintah daerah dimana pencapaian dan hasil yang diperoleh pemerintah daerah tidak dapat dilaporkan kepada masyarakat secara tepat waktu. Dari Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ditemukan adanya pengaruh opini terhadap audit delay.

## REFERENSI

- Aditya, Alifian Nur, dan Anisykurillah. 2014. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Audit Delay. *Accounting Analysis Journal* ISSN: 2252-6765.
- Akhmad, Priharjanto, dan Yusniar, Yuliana Wardani. 2017. Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan, Opini Audit, dan Karakteristik Pemerintah Daerah Halim, Abdul. 2009. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia.
- Amy, Mauliddya. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay

- Pada Pemerintah Kabupaten/Koya Di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.
- Aris, Muladi. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Cohen, S., & Leventis, S. 2013. Effects of Municipal, Auditing and Political Factors on Audit Delay. *Accounting Forum*, 37(1), 40-53
- Ghozali, Imam. 2011. *Dasar-Dasar Econometrica dengan Menggunakan SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Kartika, Andi. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay* (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, November 2011, Hal: 152-171 ISSN: 1979-4878.
- Kusnandar, dan Dodik Siswantoro. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. *Rosidi* *Simposium Nasional Akuntansi XIII*.
- Luthfi, Fachrurozi. 2014. Analisis Fakor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Muhamad, Azhari, *dkk*. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay* (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 10*.
- Nabilla, Ilna. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay* Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Lampung.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. (<http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf>, diunduh pada tanggal 9 April 2017).
- Puspitasari, Ketut Dian, dan Made Yeni Latrini. 2014. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Anak Perusahaan, Leverage dan Ukuran KAP terhadap Audit Delay. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 8.2

(2014): 283-299, ISSN: 2302-8556.

diunduh pada tanggal 10 April 2017).

Saputri, Oviek Dewi. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay*. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.

Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.

Siregar, Baldric. 2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Audit Delay Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *JRAK, Volume 11, No. 2 Agustus 2015*.

Sudarsana, Hafidh Susila. 2013. Pengaruh Karakteristik

Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Skripsi*. Universitas Diponegoro.

Tiara, Pandansari. (2016) Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, Dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Volume Xix No. 3, Desember 2016, Issn 1979 – 6471.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (<http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file->

[Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. \(\[http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file-storage-13861611\\\_11.pdf\]\(http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file-storage-13861611\_11.pdf\), diunduh pada tanggal 10 April 2017\).](http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file-storage-13861611_11.pdf)

[Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. \(<http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU15-2004PemeriksaanKeuangan.pdf>, diunduh pada tanggal 10 April 2017\).](http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU15-2004PemeriksaanKeuangan.pdf)

[Nomor 33 storage-1286152419.pdf,](http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file-storage-1286152419.pdf)

Tahun 2004 tentang  
Perimbangan

Keuan  
gan Antara Pemerintah  
Pusat dan Pemerintah  
Daera

h.

[http://www.djpk.depkeu.g  
o.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

[/attach/post-uu-no-33-  
tahun- 2004-tentang-  
perimbangan- keuangan-  
antara-pemerintah- pusat-  
dan-pemerintah-  
daerah/UU-228-263-  
UNDANG-UNDANG-  
REPUBLIK-  
INDONESIA- NOMOR  
33-](#)

[TAHUN-](#)

[2004.pdf,](#)

diunduh

pada

tanggal 20 April 2017).